



**DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

## **LAPORAN BULANAN AGUSTUS 2024**

Jasa Konsultansi :  
**BANTUAN TEKNIS  
SEKRETARIAT BERSAMA PENGENDALIAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
TAHUN 2024**



**PT. INDOMAS MULIA**

*Engineering & Management Advisory Services*

Jl. Raya Pasar Minggu No. 7B Kel. Kalibata, Kec. Pancoran- Jakarta Selatan

Jalan Kalibata Tengah No. 6, Jakarta Selatan - 12740

Telpon : (021) 794.5177, 794.5178, Fax : (021) - 794.5178



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan bulan Juli 2024 pekerjaan jasa konsultasi Bantuan Teknis Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan bulan Agustus 2024 ini disusun untuk memenuhi kewajiban output pekerjaan tim konsultan sesuai syarat kontrak nomor 398/PRC/PPK-SET/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas proses dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tim konsultan bantuan teknis Sekber Pengendalian DAK.

Laporan bulanan ini secara garis besar berisi, kemajuan kegiatan yang dilakukan selama satu bulan yang terdiri dari :

1. Pendahuluan
2. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Agustus 2024
3. Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Agustus 2024
4. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Bulan September 2024
5. Penutup

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi beserta saran dan masukan sehingga laporan bulan Juli 2024 ini dapat tersusun. Semoga hal-hal yang disampaikan, dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengendalian DAK maupun untuk bidang/kegiatan lain yang terkait.

Jakarta, Agustus 2024

PT. Indomas Mulia

Lukman Nul Hakim  
Team Leader



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	iii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	5
1.3 Keluaran.....	5
1.4 Sistematika Pelaporan.....	5
<b>BAB 2 RENCANA KERJA DAN TARGET KELUARAN BULAN AGUSTUS 2024</b> .....	6
2.1 Rencana Kerja Bulan Agustus 2024.....	6
2.2 Indikator Target Kegiatan.....	7
<b>BAB 3 REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN BULAN AGUSTUS 2024</b> .....	9
2.1 Updating Data Hasil Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024.....	9
2.2 Dukungan dan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dan Daerah.....	21
2.2.1 Dukungan dan Koordinasi K/L.....	21
2.2.2 Dukungan Kepada Pemerintah Daerah.....	23
2.3 Dukungan dan Koordinasi Internal.....	24
<b>BAB 4 RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN BULAN SEPTEMBER 2024</b> .....	25
4.1 Rencana Kerja Bulan September 2024.....	25
<b>BAB 5 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI</b> .....	26
5.1 Permasalahan.....	26
5.2 Rekomendasi.....	26
<b>LAMPIRAN 1. DOKUMENTASI KEGIATAN BANTEK SEKBER DAK</b>	



---

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1. Rencana Kerja Bulan Agustus 2024 .....	6
Tabel 2. Indikator Target Kegiatan .....	7
Tabel 3. Finalisasi Data DAK Tahun 2024 .....	9
Tabel 4. Tingkat Kepatuhan Penyampaian Pelaporan DAK Tahun 2024.....	10
Tabel 5. Realisasi Keuangan Per Bidang dan sub Bidang Pelaksanaan DAK Tahun 2024.....	14
Tabel 6. Realisasi Keuangan Per Tematik Pelaksanaan DAK Tahun 2024 (Rp. 000).....	16
Tabel 7. Realisasi Keuangan Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2024 Per-Provinsi Berdasarkan Data BINWASDAK (Rp.000) .....	18
Tabel 8. Realisasi Keuangan Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2024 Per-Bidang Berdasarkan Data BINWASDAK (Rp.000) .....	20
Tabel 9. Realisasi Dukungan dan Koordinasi Lintas K/L dan Daerah .....	21
Tabel 10. Realisasi Dukungan dan Koordinasi Internal.....	24
Tabel 11. Rencana Kerja Bulan September 2024 .....	25

---

## DAFTAR GRAFIK

---

Grafik 1. Kepatuhan Pelaporan Daerah Dalam Pelaksanaan DAK Tahun 2024 Per Triwulan I dan II .....	11
Grafik 2. Kepatuhan Pelaporan Daerah Periode Triwulan I dan II Dalam Pelaksanaan DAK Tahun 2024 Per- Provinsi .....	11
Grafik 3. Realisasi Keuangan DAK Tahun 2024 (OMSPAN – BINWASDAK) .....	13
Grafik 4. Realisasi Keuangan DAK Tahun 2024 Per Bidang .....	15
Grafik 5. Realisasi Keuangan DAK Tahun 2024 .....	17
Grafik 6. Realisasi Keuangan DAK Non Fisik Tahun 2024 .....	19



# Bab

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu

- (1) kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto;
- (2) kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah; dan
- (3) kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait (UU No. 23/2014 dan UU No. 33/2004).

Pentingnya DAK terhadap pembangunan daerah berkonsekuensi menuntut sebuah mekanisme akuntabilitas atas kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi di daerah.

Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam keseluruhan tahapan tersebut. Pada tahap perencanaan, Kementerian Dalam Negeri terlibat dalam proses verifikasi usulan DAK dari daerah (Permendagri 117/2017). Pada proses pelaksanaan, Kementerian Dalam Negeri berperan untuk melakukan pemantauan sekaligus supervisi dan pembinaan terhadap proses realisasi dan pelaporan atas pelaksanaan DAK di daerah (Perpres 7/2022, SEB 3 Menteri Tahun 2008). Demikian pula pada akhir pelaksanaan DAK, Kementerian Dalam Negeri berperan dalam melakukan evaluasi terkait pengelolaan DAK untuk pelaksanaan APBD (Perpres 7/2022, SEB 3 Menteri Tahun 2008).

Bantek Sekretariat Bersama DAK Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2023 telah memberikan output berupa:

1. Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan DAK Tahun 2023 dan Analisis hasil pelaksanaan DAK Tahun 2022;
2. Laporan Pelaksanaan DAK di Daerah Tahun 2023;
3. Materi substansi untuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah daerah terkait pelaksanaan DAK;
4. Data hasil pelaksanaan DAK Tahun 2023;
5. Dukungan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan verifikasi usulan kegiatan DAK Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah; dan
6. Dukungan pelaksanaan dekonsentrasi GWPP untuk kegiatan DAK.

Perkembangan penyerapan keuangan DAK Tahun 2023, berdasarkan laporan BINWASDAK dengan OMSPAN sampai dengan bulan Februari 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah alokasi DAK berdasarkan PMK Nomor 17 Tahun 2021 sebesar Rp. 53,422 Trilyun, realisasi berdasarkan BINWASDAK sebesar Rp. 14,459 Trilyun atau sekitar 27%, sedangkan realisasi berdasarkan OMSPAN Rp. 50,347 Trilyun atau sekitar 94%.
2. Memperhatikan laporan realisasi penyerapan keuangan DAK yang diperoleh melalui BINWASDAK **masih rendah**, untuk itu perlu mendapatkan perhatian untuk dioptimalkan pada tahun anggaran 2024.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka pendampingan dan fasilitasi kepada tim pembina DAK dilingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan tim pembina DAK di tingkat daerah, permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya respon Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan dana DAK, sebagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan belum proaktif dalam mengelola DAK yang diterimanya. Hal ini berdampak pada hangusnya sebagian DAK yang disebabkan permasalahan internal maupun administratif seperti terjadinya gagal

- 
- lelang pada proses pengadaan barang/jasa sebagai akibat dana yang tersedia dari DAK tidak mencukupi/tidak sesuai dengan nilai harga yang tertera dalam e-katalog;
2. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan DAK, baik antara Organisasi Perangkat Daerah (PD) dalam kabupaten/kota maupun antar Kabupaten/Kota dan Provinsi;
  3. Tidak terbentuknya Tim pengelola DAK Provinsi dan Kabupaten/Kota berdampak terhadap tidak optimalnya laporan pelaksanaan DAK Tahun 2023 dalam bentuk laporan konsolidasi per Triwulan dan beberapa Provinsi yang tidak tertib bahkan tidak menyampaikan laporan pada Tahun 2023, perlu mendapatkan perhatian khusus Tahun 2023 antara lain; Provinsi DKI Jakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Tengah, Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat;
  4. Rendahnya laporan penyerapan keuangan DAK sebagai dampak dari sebagian Provinsi dan Kabupaten/kota yang hanya melaporkan sebagian Bidang kegiatan.

Dari permasalahan diatas pada Tahun 2024 Bantek Sekber Pengendalian DAK akan melakukan langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan DAK sekaligus meningkatkan koordinasi dengan subdit pengampu DAK di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah serta Kementerian/Lembaga pengelola DAK tingkat pusat dan pemerintah daerah.

Pada tahap pemantauan dan evaluasi, Kementerian Dalam Negeri akan fokus pada pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK dari aspek pelaksanaan, administrasi keuangan, dan kepatuhan daerah dalam pelaporan DAK. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 373 s.d 378, menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan umum penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dibiayai DAK.

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pada pasal 4 menyebutkan bahwa Kementerian

Dalam Negeri memiliki peran penting dalam upaya koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan DAK di daerah yang terkait dengan **operasionalisasi dari beberapa fungsi Kementerian Dalam Negeri, khususnya fungsi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah**; pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri, serta pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pelaksanaan tugas Kementerian Dalam Negeri terkait verifikasi perencanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan DAK didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Keberadaan Jasa Konsultansi Bantuan Teknis Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Tahun 2024 akan membantu mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan implementasi pelaksanaan berbagai kebijakan dalam pengelolaan DAK di daerah, termasuk pula mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Tujuan akhirnya adalah agar pelaksanaan DAK dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan baik dari segi administrasi perencanaan kegiatan pembangunan yang akan didanai melalui DAK, administrasi pertanggungjawaban pelaporan atas pelaksanaan DAK, serta kemanfaatan DAK dalam mendukung peningkatan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan di daerah serta pembangunan fisik di berbagai sektor sesuai prioritas nasional yang berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat di daerah.

Berdasarkan UU 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023 dan Peraturan Presiden 130 tahun 2022, tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara pasal 5 Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dalam memfasilitasi pengelolaan DAK tahun 2024 perlu meningkatkan peran Sekretariat bersama DAK yang berkedudukan di Ditjen Bina

Pembangunan Daerah dengan membentuk jasa konsultasi Bantuan Teknis Sekretariat Bersama DAK Tahun 2024.

## **1.2 Tujuan dan Sasaran**

Penyusunan laporan bulanan Jasa Konsultasi Bantuan teknis Sekber DAK bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan pekerjaan tim konsultan dalam memberikan dukungan teknis dan fasilitasi kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri selaku pemberi kerja. Laporan bulanan yang disusun merupakan hasil pemantauan pelaksanaan serta evaluasi pemanfaatan DAK yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## **1.3 Keluaran**

Keluaran (output) dari laporan bulanan berupa dokumen laporan bulanan yang memuat rincian pelaksanaan kegiatan pekerjaan setiap bulannya, mulai bulan Februari s.d. Desember 2024.

## **1.4 Sistematika Pelaporan**

Laporan Bulan Agustus 2024 ini terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika laporan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Rencana Kerja dan Target Keluaran Bulan Agustus 2024
- Bab III : Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Agustus 2024
- Bab IV : Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Bulan September 2024
- Bab V : Penutup

## Bab

# RENCANA KERJA DAN TARGET KELUARAN BULAN AGUSTUS 2024

### 2.1 Rencana Kerja Bulan Agustus 2024

Pelaksanaan pekerjaan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama DAK pada bulan Agustus 2024 difokuskan pada persiapan rencana kegiatan penguatan tata Kelola DAK dan persiapan pelaksanaan pemutakhiran kodefikasi dan Nomenklatur Kegiatan DAK Tahun 2025 . Rencana kerja bulan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana Kerja Bulan Agustus 2024

No	Rencana Kegiatan dan Uraian Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Agustus 2024			
		I	II	III	IV
<b>Updating Hasil Pelaksanaan DAK Tahun 2024</b>					
1	Updating laporan hasil pelaksanaan DAK Tahun 2024 (Triwulan I dan II )				
<b>Dukungan dan Koordinasi Lintas K/L</b>					
1	Rapat Pemetaan Isu Strategis Tugas dan Wewenang GWPP				
2	Multilateral meeting Pengalokasian DAK Non Fisik Tahun 2025				
<b>Dukungan dan Koordinasi Daerah</b>					
1	Sosialisasi Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan				
2	Rapat Koordinasi Verifikasi Usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2025 dalam rangka penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat				
<b>Dukungan dan Koordinasi Internal</b>					
1	Dukungan dalam penyusunan Pemutakhiran data Pemetaan dan kodefikasi				
<b>Pelaporan</b>					
1	Pembahasan Laporan Antara				
2	Penyusunan Laporan Agustus 2024				

## 2.2 Indikator Target Kegiatan

Indikator target kegiatan merupakan bentuk keluaran dari setiap pelaksanaan aktivitas kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Indikator Target Kegiatan

No	Rencana Kegiatan dan Uraian Target Kegiatan	Keterangan/Indikator Keluaran	Penanggung Jawab
<b>Updating Hasil Pelaksanaan DAK Tahun 2024</b>			
1	Updating laporan hasil pelaksanaan DAK Tahun 2024 (Triwulan I dan II)	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan DAK Tahun 2024 Per Juni 2024	Tim Bantek Sekber DAK
<b>Dukungan dan Koordinasi Lintas K/L</b>			
1	Rapat Pemetaan Isu Strategis Tugas dan Wewenang GWPP	Menyiapkan materi dan mengikuti pelaksanaan kegiatan	Ditjen Bina Bangda dan Tim Bantek Sekber DAK
2	Multilateral meeting Pengalokasian DAK Non Fisik Tahun 2025	Mengikuti pelaksanaan kegiatan Multilateral meeting DAK Non Fisik Tahun 2025	Ditjen Bina Bangda dan Tim Bantek Sekber DAK
<b>Dukungan dan Koordinasi Daerah</b>			
1	Sosialisasi Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	Menyiapkan Materi Narasumber dan mengikuti pelaksanaan kegiatan	Ditjen Bina Bangda dan Tim Bantek Sekber DAK
2	Rapat Koordinasi Verifikasi Usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2025 dalam rangka penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat	Menyiapkan Materi Narasumber dan mengikuti pelaksanaan kegiatan	Ditjen Bina Bangda dan Tim Bantek Sekber DAK
3	Kunjungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	Fasilitasi kunjungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Ditjen Bina Bangda dan Tim Bantek Sekber DAK
4	Kunjungan Pemerintah Daerah Kota Dumai Provinsi Riau	Fasilitasi kunjungan Pemerintah Daerah Kota Dumai Provinsi Riau	Ditjen Bina Bangda dan Tim Bantek Sekber DAK



No	Rencana Kegiatan dan Uraian Target Kegiatan	Keterangan/Indikator Keluaran	Penanggung Jawab
<b>Dukungan dan Koordinasi Internal</b>			
1	Dukungan dalam penyusunan Pemutakhiran data dan kodefikasi kegiatan DAK	Melakukan koordinasi dengan subdit pengampu DAK dan menyusun Pemutakhiran data dan kodefikasi kegiatan DAK	Ditjen Bina Bangda dan Tim Bantek Sekber DAK
<b>Pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan</b>			
1	Pembahasan Laporan Antara	Menyusun laporan antara dan	TL dan TA
2	Penyusunan Laporan Agustus 2024	Laporan Bulan Agustus Tahun 2024	TL dan TA

## Bab

# REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN BULAN AGUSTUS 2024

Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Teknis Sekretariat Bersama DAK pada bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

### 2.1 Updating Data Hasil Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024

*Tabel 3. Finalisasi Data DAK Tahun 2024*

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Proses	Output
1	Laporan Hasil Pelaksanaan DAK Triwulan I dan II Tahun 2024	Minggu I s.d. IV Agustus 2024	Inputing data yang masuk dari daerah secara berkala	Data Hasil Pelaksanaan DAK Triwulan I s.d. II Tahun 2024 Per 30 Agustus 2024

#### 2.1.1 Laporan Hasil Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2024

##### a. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan DAK Tahun 2024

Berdasarkan data yang diterima oleh Bantek Sekber DAK sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024, untuk Laporan Triwulan I Total daerah yang sudah melapor sebanyak 228 daerah (41,76%) yang terdiri dari 17 Provinsi, 181 Kabupaten dan 30 Kota. Sedangkan jumlah daerah yang belum melapor sebanyak 318 daerah (59,24%) yang terdiri dari 21 Provinsi, 234 Kabupaten dan 63 Kota.

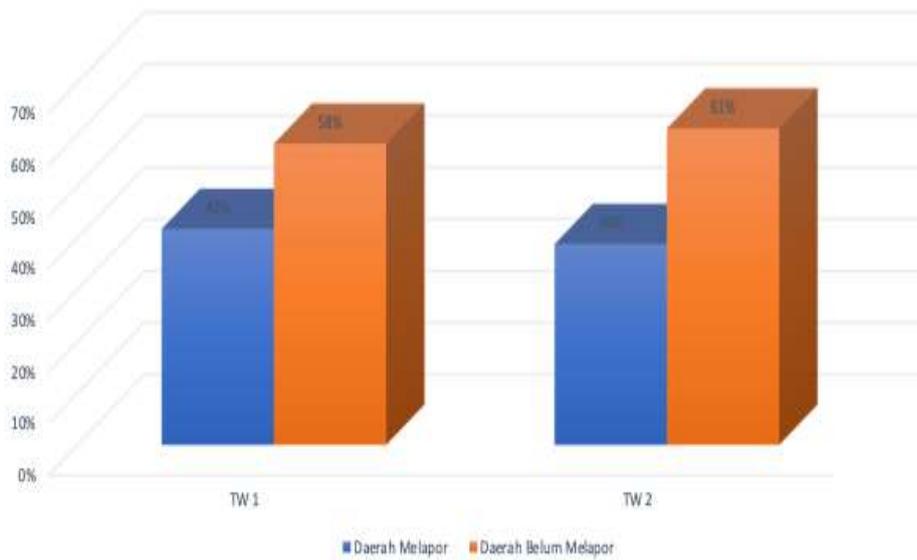
Untuk Triwulan II, Total daerah yang sudah melapor sebanyak 212 daerah (38,83%) yang terdiri dari 13 Provinsi, 168 Kabupaten dan 31 Kota. Sedangkan jumlah daerah yang belum melapor sebanyak 334 daerah (61,17%) yang terdiri dari 25 Provinsi, 247 Kabupaten dan 62 Kota.

Tabel 4. Tingkat Kepatuhan Penyampaian Pelaporan DAK Tahun 2024

NO	NAMA DAERAH	TW. I	TW. II	RATA2
1	Prov. Aceh	4,17%	4,17%	4,17%
2	Prov. Sumatera Utara	5,88%	2,94%	4,41%
3	Prov. Sumatera Barat	70,00%	65,00%	67,50%
4	Prov. Riau	15,38%	15,38%	15,38%
5	Prov. Jambi	66,67%	50,00%	58,33%
6	Prov. Sumatera Selatan	5,56%	5,56%	5,56%
7	Prov. Bengkulu	36,36%	27,27%	31,82%
8	Prov. Lampung	50,00%	37,50%	43,75%
9	Prov. Bangka Belitung	62,50%	62,50%	62,50%
10	Prov. Kepulauan Riau	100,00%	100,00%	100,00%
11	Provinsi DKI Jakarta	0,00%	0,00%	0,00%
12	Prov. Jawa Barat	7,14%	46,43%	26,79%
13	Prov. Jawa Tengah	94,44%	94,44%	94,44%
14	Prov. DI Yogyakarta	100,00%	0,00%	50,00%
15	Prov. Jawa Timur	5,13%	5,13%	5,13%
16	Prov. Banten	0,00%	0,00%	0,00%
17	Prov. Bali	100,00%	100,00%	100,00%
18	Prov. Nusa Tenggara Barat	45,45%	36,36%	40,91%
19	Prov. Nusa Tenggara Timur	39,13%	30,43%	34,78%
20	Prov. Kalimantan Barat	100,00%	100,00%	100,00%
21	Prov. Kalimantan Tengah	100,00%	100,00%	100,00%
22	Prov. Kalimantan Selatan	78,57%	78,57%	78,57%
23	Prov. Kalimantan Timur	0,00%	0,00%	0,00%
24	Prov. Kalimantan Utara	100,00%	100,00%	100,00%
25	Prov. Sulawesi Utara	0,00%	0,00%	0,00%
26	Prov. Sulawesi Tengah	71,43%	0,00%	35,71%
27	Prov. Sulawesi Selatan	100,00%	100,00%	100,00%
28	Prov. Sulawesi Tenggara	22,22%	11,11%	16,67%
29	Prov. Gorontalo	85,71%	85,71%	85,71%
30	Prov. Sulawesi Barat	14,29%	14,29%	14,29%
31	Prov. Maluku	83,33%	91,67%	87,50%
32	Prov. Maluku Utara	36,36%	36,36%	36,36%
33	Prov. Papua	0,00%	0,00%	0,00%
34	Prov. Papua Barat	0,00%	0,00%	0,00%
35	Prov Papua Selatan	0,00%	0,00%	0,00%
36	Prov Papua Tengah	0,00%	0,00%	0,00%
37	Prov Papua Pegunungan	0,00%	0,00%	0,00%
38	Prov Papua Barat Daya	0,00%	0,00%	0,00%
<b>RATA-RATA</b>		<b>41,76%</b>	<b>38,83%</b>	<b>40,29%</b>

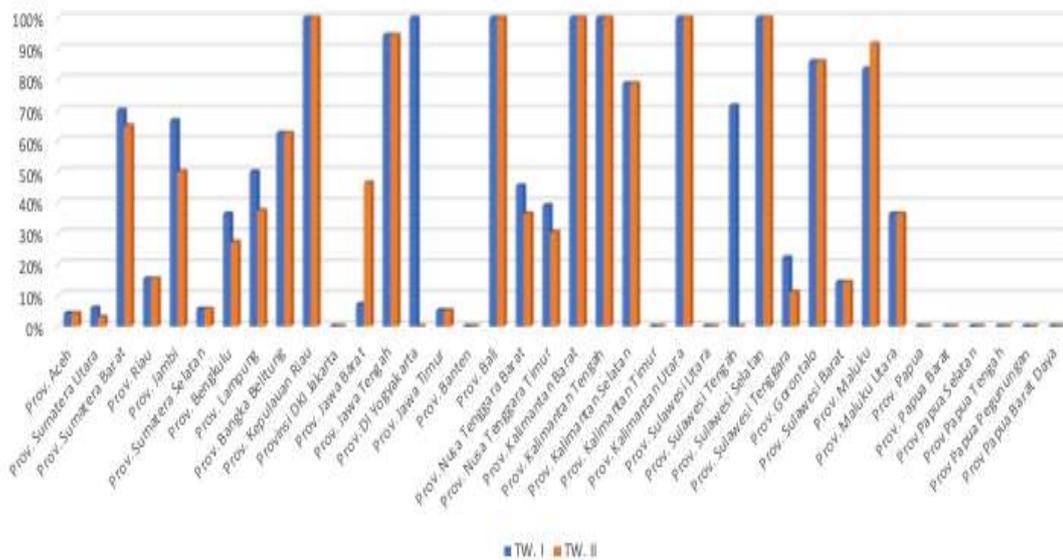
Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Pembangunan Daerah Per 31 Agustus 2024

Grafik 1. Kepatuhan Pelaporan Daerah Dalam Pelaksanaan DAK Tahun 2024 Per Triwulan I dan II



Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Pembangunan Daerah Per 31 Agustus 2024

Grafik 2. Kepatuhan Pelaporan Daerah Periode Triwulan I dan II Dalam Pelaksanaan DAK Tahun 2024 Per- Provinsi



Sumber: Data Sekber Ditjen Bina Pembangunan Daerah Per 31 Agustus 2024

**b. Laporan Penyaluran dan Realisasi Keuangan Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2024****(1). Data Penyerapan Keuangan Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2024**

NO	NAMA DAERAH	PAGU PMK	PENYALURAN OMSPAN KEU (Rp)	PENYALURAN OMSPAN KEU (%)	REALISASI BINWAS KEU (Rp)	REALISASI BINWAS KEU (%)
1	ACEH	2.114.833.977	685.533.932	32,42%	-	0,00%
2	SUMATERA UTARA	3.445.406.017	1.019.005.177	29,58%	-	0,00%
3	SUMATERA BARAT	1.126.548.928	402.524.684	35,73%	47.151.388	4,19%
4	RIAU	1.088.954.591	353.298.159	32,44%	1.095.784	0,10%
5	JAMBI	932.230.541	318.078.922	34,12%	14.913.497	1,60%
6	SUMATERA SELATAN	1.430.073.771	474.241.902	33,16%	-	0,00%
7	BENGKULU	1.089.235.188	396.355.156	36,39%	-	0,00%
8	LAMPUNG	1.453.583.033	478.103.665	32,89%	33.399.316	2,30%
9	BANGKA BELITUNG	493.766.275	187.186.950	37,91%	6.659.729	1,35%
10	KEP. RIAU	648.360.942	229.593.857	35,41%	-	0,00%
11	DKI JAKARTA	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
12	JAWA BARAT	3.516.944.781	984.720.114	28,00%	-	0,00%
13	JAWA TENGAH	3.897.341.102	1.254.791.086	32,20%	190.604.320	4,89%
14	DIY	552.657.507	187.328.624	33,90%	-	0,00%
15	JAWA TIMUR	3.694.931.680	1.178.614.912	31,90%	9.104.052	0,25%
16	BANTEN	763.286.502	259.730.969	34,03%	-	0,00%
17	BALI	495.233.657	211.474.366	42,70%	3.665.459	0,74%
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.707.333.483	563.477.633	33,00%	24.971.889	1,46%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.219.776.353	915.596.330	28,44%	52.173.892	1,62%
20	KALIMANTAN BARAT	1.665.714.863	556.316.263	33,40%	-	0,00%
21	KALIMANTAN TENGAH	1.293.764.942	510.098.758	39,43%	13.523.203	1,05%
22	KALIMANTAN SELATAN	1.065.951.408	379.424.176	35,59%	53.454.478	5,01%
23	KALIMANTAN TIMUR	884.011.542	269.861.739	30,53%	-	0,00%
24	KALIMANTAN UTARA	382.981.918	139.292.858	36,37%	8.231.469	2,15%
25	SULAWESI UTARA	1.203.927.756	408.435.837	33,93%	-	0,00%
26	SULAWESI TENGAH	1.655.367.163	524.810.853	31,70%	-	0,00%
27	SULAWESI SELATAN	2.715.197.528	859.417.598	31,65%	104.051.989	3,83%
28	SULAWESI TENGGARA	1.578.005.757	487.943.591	30,92%	-	0,00%
29	GORONTALO	648.627.131	231.622.099	35,71%	-	0,00%
30	SULAWESI BARAT	637.132.311	230.072.326	36,11%	9.777.246	1,53%
31	MALUKU	1.182.519.683	286.918.093	24,26%	-	0,00%
32	MALUKU UTARA	1.246.408.968	341.340.418	27,39%	9.777.565	0,78%
33	PAPUA	1.097.846.524	318.944.619	29,05%	-	0,00%
34	PAPUA BARAT	828.205.039	178.309.381	21,53%	-	0,00%
35	PAPUA SELATAN	677.194.425	159.361.875	23,53%	-	0,00%
36	PAPUA TENGAH	969.681.664	264.113.370	27,24%	-	0,00%
37	PAPUA PEGUNUNGAN	1.666.588.692	493.863.802	29,63%	-	0,00%
38	PAPUA BARAT DAYA	752.838.193	151.503.100	20,12%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>53.822.463.835</b>	<b>16.891.307.193</b>	<b>31,38%</b>	<b>582.555.275</b>	<b>1,08%</b>

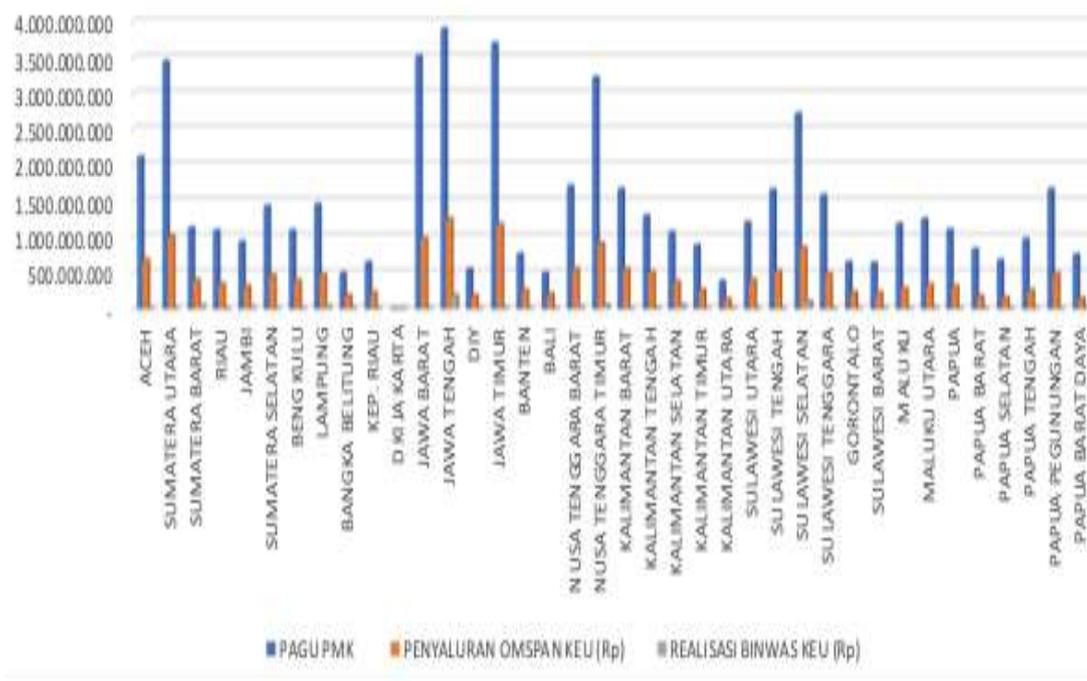
Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Bangda Per 31 Agustus 2024

\*) Dalam ribuan

Sampai dengan bulan Agustus 2024, berdasarkan data OMSPAN, Kementerian Keuangan telah menyalurkan DAK kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp. 16.891.307.139.000 atau 31,38%. Namun demikian, realisasi penyerapan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda baru mencapai Rp. 582.555.275.000 atau 1,08%.

Bantek Sekber DAK telah melakukan koordinasi terkait penyampaian pelaporan realisasi penyerapan DAK kepada Pemerintah Daerah, namun terkendala dengan banyaknya Pemerintah Daerah yang mengacu pada Petunjuk Teknis DAK Tahun 2025 yang telah menghilangkan penyampaian pelaporan pelaksanaan DAK kepada Kementerian Dalam Negeri.

Grafik 3. Realisasi Keuangan DAK Tahun 2024 (OMSPAN – BINWASDAK)



Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Pembangunan Daerah Per 31 Agustus 2024

**(2). Realisasi DAK Fisik Perbidang TA 2024**

Tabel 5. Realisasi Keuangan Per Bidang dan sub Bidang Pelaksanaan DAK Tahun 2024 (Rp. 000)

NO	NAMA BIDANG	PAGU PMK	PENYALURAN OMSPAN RP.	PENYALURAN OMSPAN %	REALISASI BINWAS RP.	REALISASI KEUANGAN %
<b>PENUGASAN</b>		<b>53.822.463.835,00</b>	<b>16.891.307.192,76</b>	<b>31,38%</b>	<b>582.555.274,53</b>	<b>1,08%</b>
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>15.820.300.000,00</b>	<b>4.327.966.282,39</b>	<b>27,36%</b>	<b>55.450.754,41</b>	<b>0,35%</b>
1	PAUD	422.733.486,00	240.270.972,27	56,84%	1.575.918,00	0,37%
2	SD	5.285.378.584,00	1.393.263.628,57	26,36%	21.163.654,00	0,40%
3	SMP	3.790.202.177,00	997.046.594,89	26,31%	17.474.782,80	0,46%
4	SKB	123.943.380,00	67.408.669,80	54,39%	-	0,00%
5	SMA	2.152.302.975,00	533.932.576,20	24,81%	181.213,00	0,01%
6	SLB	375.983.727,00	76.759.437,41	20,42%	1.080.689,00	0,29%
7	SMK	3.144.755.691,00	786.689.474,07	25,02%	238.282,00	0,01%
8	PERPUSTAKAAN	525.000.000,00	232.594.929,19	44,30%	13.736.215,61	2,62%
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>13.400.000.000,00</b>	<b>3.715.780.148,01</b>	<b>27,73%</b>	<b>51.902.760,55</b>	<b>0,39%</b>
1	PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU BAYI DAN INTERVENSI STUNTING	1.217.809.178,00	344.102.968,75	28,26%	16.209.997,55	1,33%
2	PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	11.782.190.822,00	3.189.363.245,80	27,07%	31.802.639,00	0,27%
3	KELUARGA BERENCANA	400.000.000,00	182.313.933,46	45,58%	3.890.124,00	0,97%
<b>3</b>	<b>JALAN</b>	<b>12.205.228.957,00</b>	<b>4.977.521.936,28</b>	<b>40,78%</b>	<b>368.398.834,24</b>	<b>3,02%</b>
1	JALAN Mendukung konektivitas daerah	5.596.963.835,00	2.360.729.245,85	42,18%	245.388.161,26	4,38%
2	TEMATIK Penguatan destinasi pariwisata prioritas	1.000.000.000,00	396.759.432,28	39,68%	11.130.174,37	1,11%
3	TEMATIK Peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi	1.500.000.000,00	541.001.660,31	36,07%	9.976.819,40	0,67%
4	TEMATIK Pengembangan food estate	1.100.000.000,00	443.350.243,95	40,30%	12.144.828,95	1,10%
5	TEMATIK Penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian perikanan dan hewani)	3.008.265.122,00	1.235.681.353,90	41,08%	89.758.850,26	2,98%
<b>4</b>	<b>AIR MINUM</b>	<b>2.441.600.000,00</b>	<b>852.828.019,86</b>	<b>34,93%</b>	<b>28.070.348,20</b>	<b>1,15%</b>
1	AIR MINUM Mendukung peningkatan kualitas sdm	2.375.753.042,00	823.588.075,47	34,67%	28.070.348,20	1,18%
2	TEMATIK Pengentasan permukiman kumuh terpadu	65.846.958,00	29.239.944,38	44,41%	-	0,00%
<b>5</b>	<b>SANITASI</b>	<b>1.693.700.000,00</b>	<b>598.070.016,69</b>	<b>35,31%</b>	<b>16.263.930,00</b>	<b>0,96%</b>
1	SANITASI Mendukung peningkatan kualitas sdm	1.643.855.791,00	582.324.769,16	35,42%	16.263.930,00	0,99%
2	TEMATIK Pengentasan permukiman kumuh terpadu	49.844.209,00	15.745.247,53	31,59%	-	0,00%
<b>6</b>	<b>PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>312.734.878,00</b>	<b>81.914.356,73</b>	<b>26,19%</b>	<b>1.036.407,00</b>	<b>0,33%</b>
1	TEMATIK Pengentasan permukiman kumuh terpadu	312.734.878,00	81.914.356,73	26,19%	1.036.407,00	0,33%
<b>7</b>	<b>IRIGASI</b>	<b>1.688.900.000,00</b>	<b>611.283.302,86</b>	<b>36,19%</b>	<b>32.141.067,91</b>	<b>1,90%</b>
1	TEMATIK Pengembangan food estate	303.581.616,00	93.776.601,10	30,89%	4.700.822,20	1,55%
2	TEMATIK Penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian perikanan dan hewani)	1.385.318.384,00	517.506.701,76	37,36%	27.440.245,71	1,98%
<b>8</b>	<b>PERTANIAN</b>	<b>2.462.600.000,00</b>	<b>674.414.034,55</b>	<b>27,39%</b>	<b>12.961.212,52</b>	<b>0,53%</b>
1	TEMATIK Pengembangan food estate	385.096.297,00	93.071.908,58	24,17%	106.345,00	0,03%
2	TEMATIK Penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian perikanan dan hewani)	2.077.503.703,00	581.342.125,96	27,98%	12.854.867,52	0,62%
<b>9</b>	<b>KELAUJUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.309.900.000,00</b>	<b>354.757.835,72</b>	<b>27,08%</b>	<b>8.221.302,10</b>	<b>0,63%</b>
1	TEMATIK Penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian perikanan dan hewani)	1.309.900.000,00	354.757.835,72	27,08%	8.221.302,10	0,63%
<b>10</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>13,46%</b>	<b>18.629,00</b>	<b>0,01%</b>
1	TEMATIK Penguatan destinasi pariwisata prioritas	130.000.000,00	17.500.000,00	13,46%	18.629,00	0,01%

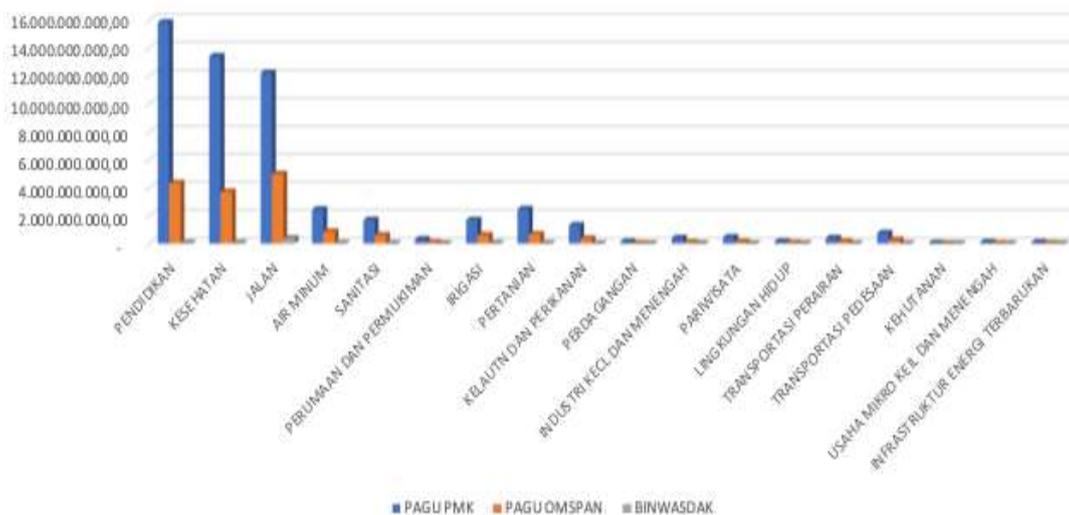


NO	NAMA BIDANG	PAGU PMK	PENYALURAN OMSPAN RP.	PENYALURAN OMSPAN %	REALISASI BINWAS RP.	REALISASI KEUANGAN %
<b>PENUGASAN</b>		<b>53.822.463.835,00</b>	<b>16.891.307.192,76</b>	<b>31,38%</b>	<b>582.555.274,53</b>	<b>1,08%</b>
11	INDUSTRI KECL DAN MENENGAH	400.000.000,00	76.431.766,11	19,11%	498.870,00	0,12%
1	TEMATIK Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	400.000.000,00	76.431.766,11	19,11%	498.870,00	0,12%
12	PARIWISATA	450.000.000,00	119.049.639,35	26,46%	755.565,00	0,17%
1	TEMATIK Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	450.000.000,00	119.049.639,35	26,46%	755.565,00	0,17%
13	LINGKUNGAN HIDUP	137.630.744,00	49.920.735,72	36,27%	1.139.682,90	0,83%
1	TEMATIK Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	137.630.744,00	49.920.735,72	36,27%	1.139.682,90	0,83%
14	TRANSPORTASI PERAIRAN	400.000.000,00	130.655.469,40	32,66%	-	0,00%
1	TEMATIK Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	400.000.000,00	130.655.469,40	32,66%	-	0,00%
15	TRANSPORTASI PEDESAAAN	750.000.000,00	263.008.400,63	35,07%	5.695.910,70	0,76%
1	TEMATIK Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	750.000.000,00	263.008.400,63	35,07%	5.695.910,70	0,76%
16	KEHUTANAN	31.869.256,00	455.936,74	1,43%	-	0,00%
1	TEMATIK Pengembangan Food Estate	31.869.256,00	455.936,74	1,43%	-	0,00%
17	USAHA MIKRO KECL DAN MENENGAH	100.000.000,00	17.749.311,73	17,75%	-	0,00%
1	TEMATIK Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	100.000.000,00	17.749.311,73	17,75%	-	0,00%
18	INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN	88.000.000,00	22.000.000,00	25,00%	-	0,00%
1	TEMATIK Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	88.000.000,00	22.000.000,00	25,00%	-	0,00%
<b>TOTAL FISIK</b>		<b>53.822.463.835,00</b>	<b>16.891.307.192,76</b>	<b>31,38%</b>	<b>582.555.274,53</b>	<b>1,08%</b>

Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Bangda Per 31 Agustus 2024

Berdasarkan data OMSPAN realisasi penyaluran tertinggi terdapat pada bidang jalan dengan realisasi penyaluran sebesar 40,78 % atau Rp 4.977.521.936.280 dari pagu Rp. 12.205.228.957.000. Sedangkan realisasi penyerapan yang dilaporkan melalui Kemendagri, untuk realisasi tertinggi terdapat pada bidang Jalan dengan realisasi penyerapan sebesar 368.398.834.240

Grafik 4. Realisasi Keuangan DAK Tahun 2024 Per Bidang



Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Pembangunan Daerah Per 31 Agustus 2024

### (3). Realisasi DAK Fisik Per tematik TA 2024

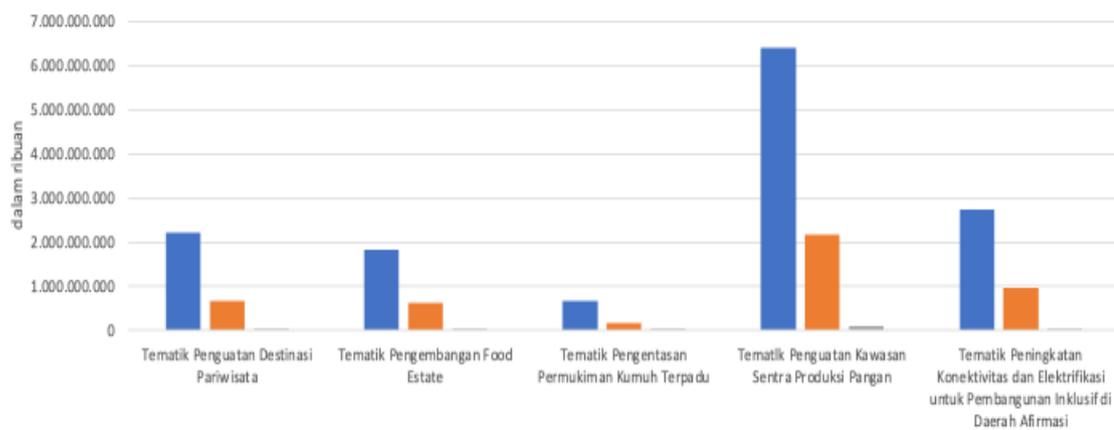
Tabel 6. Realisasi Keuangan Per Tematik Pelaksanaan DAK Tahun 2024 (Rp. 000)

TEMATIK	NAMA BIDANG	PAGU PMK	PENYALURAN OMSPAN RP.	PENYALURAN OMSPAN %	REALISASI BINWAS RP.	REALISASI KEUANGAN %
Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	450.000.000	119.049.639	26,46%	755.565	0,17%
	IKM	400.000.000	76.431.766	19,11%	498.870	0,12%
	Jalan	1.000.000.000	396.759.432	39,68%	11.130.174	1,11%
	Lingkungan hidup	137.630.744	49.920.736	36,27%	1.139.683	0,83%
	Perdagangan	130.000.000	17.500.000	13,46%	18.629	0,01%
UMKM	100.000.000	17.749.312	17,75%	0	0,00%	
<b>TOTAL</b>		<b>2.217.630.744</b>	<b>677.410.885</b>	<b>30,55%</b>	<b>13.542.921</b>	<b>0,61%</b>
Tematik Pengembangan Food Estate	Pertanian	385.096.297	93.071.909	24,17%	106.345	0,03%
	Irigasi	303.581.616	93.776.601	30,89%	4.700.822	1,55%
	Jalan	1.100.000.000	443.350.244	40,30%	12.144.829	1,10%
	Kehutanan	31.869.256	455.937	1,43%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>1.820.547.169</b>	<b>630.654.690</b>	<b>34,64%</b>	<b>16.951.996</b>	<b>0,93%</b>
Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Perkim	312.734.878	81.914.357	26,19%	1.036.407	0,33%
	Air Minum	312.734.878	81.914.357	26,19%	1.036.407	0,33%
	Sanitasi	49.844.209	15.745.248	31,59%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>675.313.965</b>	<b>179.573.961</b>	<b>26,59%</b>	<b>2.072.814</b>	<b>0,31%</b>
Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	Pertanian	2.077.503.703	581.342.126	27,98%	12.854.868	0,62%
	KKP	1.309.900.000	354.757.836	27,08%	8.221.302	0,63%
	Jalan	3.008.265.122	1.235.681.354	41,08%	89.758.850	2,98%
<b>TOTAL</b>		<b>6.395.668.825</b>	<b>2.171.781.316</b>	<b>33,96%</b>	<b>110.835.020</b>	<b>1,73%</b>
Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi	Transdes	750.000.000	263.008.401	35,07%	5.695.911	0,76%
	Transair	400.000.000	130.655.469	32,66%	0	0,00%
	Jalan	1.500.000.000	541.001.660	36,07%	9.976.819	0,67%
	IET	88.000.000	22.000.000	25,00%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>2.738.000.000</b>	<b>956.665.530</b>	<b>34,94%</b>	<b>15.672.730</b>	<b>0,57%</b>
<b>TOTAL TEMATIK</b>		<b>13.847.160.703</b>	<b>4.616.086.382</b>	<b>33,34%</b>	<b>159.075.481</b>	<b>1,15%</b>

Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Bangda Per 31 Agustus 2024

Realisasi penyaluran dana berdasarkan data OMSPAN terdapat pada tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangani dengan nilai realisasi sebesar 33,96% atau sebesar 2.717.781.316.000 dari pagu PMK 6.395.668.825.000. Sedangkan penyerapan dana per-tematik tertinggi berdasarkan data binwasdak terdapat pada tematik penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan sebesar 110.835.020.000 (1,73%) dari pagu PMK sebesar 6.395.658.825.000.

Grafik 5. Realisasi Keuangan DAK Tahun 2024



Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Bangda Per 31 Agustus 2024

### c. Laporan Realisasi Keuangan Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2024

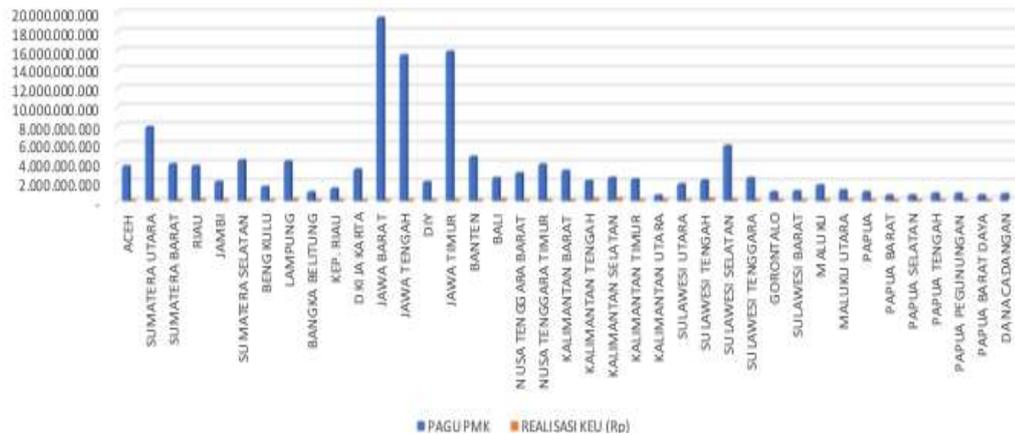
#### (1) Realisasi Keuangan Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2024

Tabel 7. Realisasi Keuangan Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2024 Per-Provinsi Berdasarkan Data BINWASDAK (Rp.000)

NO	NAMA DAERAH	PAGU PMK	REALISASI KEU (Rp)	REALISASI KEU (%)
1	ACEH	3.624.951.271	-	0,00%
2	SUMATERA UTARA	7.792.110.021	-	0,00%
3	SUMATERA BARAT	3.855.948.980	9.197.743	0,24%
4	RIAU	3.650.440.093	37.824.426	1,04%
5	JAMBI	1.971.582.293	-	0,00%
6	SUMATERA SELATAN	4.251.073.215	-	0,00%
7	BENGKULU	1.438.580.150	-	0,00%
8	LAMPUNG	4.126.748.464	72.215.418	1,75%
9	BANGKA BELITUNG	862.933.335	1.487.155	0,17%
10	KEP. RIAU	1.239.240.345	-	0,00%
11	DKI JAKARTA	3.274.245.548	-	0,00%
12	JAWA BARAT	19.394.492.569	-	0,00%
13	JAWA TENGAH	15.421.345.603	1.918.218	0,01%
14	DIY	1.937.483.909	-	0,00%
15	JAWA TIMUR	15.798.352.867	4.869.470	0,03%
16	BANTEN	4.628.725.558	-	0,00%
17	BALI	2.362.162.175	63.376.362	2,68%
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.890.666.283	7.608.522	0,26%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.811.330.708	1.255.910	0,03%
20	KALIMANTAN BARAT	3.135.634.945	-	0,00%
21	KALIMANTAN TENGAH	2.057.993.110	138.026.188	6,71%
22	KALIMANTAN SELATAN	2.396.505.487	183.704.504	7,67%
23	KALIMANTAN TIMUR	2.234.277.981	-	0,00%
24	KALIMANTAN UTARA	515.925.999	28.548.117	5,53%
25	SULAWESI UTARA	1.714.161.988	-	0,00%
26	SULAWESI TENGAH	2.106.925.064	157.030.797	7,45%
27	SULAWESI SELATAN	5.793.000.658	53.211.928	0,92%
28	SULAWESI TENGGARA	2.368.086.591	-	0,00%
29	GORONTALO	865.779.402	-	0,00%
30	SULAWESI BARAT	974.077.621	-	0,00%
31	MALUKU	1.595.162.443	-	0,00%
32	MALUKU UTARA	1.074.293.505	-	0,00%
33	PAPUA	880.842.729	-	0,00%
34	PAPUA BARAT	511.311.740	-	0,00%
35	PAPUA SELATAN	546.370.833	-	0,00%
36	PAPUA TENGAH	730.963.278	-	0,00%
37	PAPUA PEGUNUNGAN	717.544.544	-	0,00%
38	PAPUA BARAT DAYA	539.409.641	-	0,00%
	DANA CADANGAN	673.930.698		
	<b>TOTAL</b>	<b>133.764.611.644</b>	<b>760.274.758</b>	<b>0,57%</b>

Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Bangda Per 31 Agustus 2024

Grafik 6. Realisasi Keuangan DAK Non Fisik Tahun 2024



Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Bangsa Per 31 Agustus 2024

Data realisasi keuangan Non Fisik sampai dengan 30 Agustus 2024 yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah baru sebesar Rp.760.274.758.000 atau sebesar 0,57 % dari pagu alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp. 133.764.611.644.000. Jumlah Provinsi yang melaporkan pada periode agustus mengalami peningkatan, dari 8 Provinsi menjadi 14 Provinsi yang telah melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Diharapkan pada periode bulan mendatang, jumlah provinsi yang melaporkan kegiatan DAK Non Fisik semakin mengalami peningkatan

Tabel 8. Realisasi Keuangan Pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2024 Per-Bidang Berdasarkan Data BINWASDAK (Rp.000)

NO	NAMA BIDANG	PAGU PMK	REALISASI BINWAS RP.	REALISASI KEUANGAN %
<b>NON FISIK</b>		<b>133.764.611.644,00</b>	<b>760.274.757,86</b>	<b>0,57%</b>
19	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	53.561.695.570,00	292.282.405,50	0,55%
1	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (REGULER)	52.089.779.320,00	286.929.580,50	0,55%
2	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (KINERJA)	1.471.916.250,00	5.352.825,00	0,36%
20	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	4.009.097.820,00	33.908.954,81	0,85%
1	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (REGULER)	3.930.257.820,00	33.864.770,81	0,86%
2	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (KINERJA)	78.840.000,00	44.184,00	0,06%
21	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	1.618.832.360,00	12.726.841,43	0,79%
1	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (REGULER)	1.564.877.360,00	12.041.765,43	0,77%
2	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (KINERJ)	53.955.000,00	685.076,00	1,27%
22	TUNJANGAN PROFESI GURU	53.175.282.097,00	275.774.211,90	0,52%
23	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	1.209.031.712,00	13.113.995,11	1,08%
24	TUNJANGAN KHUSUS GURU	1.897.621.483,00	45.042.617,00	2,37%
25	BANTUAN OPERASIONAL MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	169.975.000,00	1.032.297,78	0,61%
1	MUSEUM	120.300.000,00	622.527,78	0,52%
2	TAMAN BUDAYA	49.675.000,00	409.770,00	0,82%
26	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	12.878.672.152,00	61.113.255,85	0,47%
1	BOK DINAS PROVINSI	278.330.253,00	7.359.062,19	2,64%
2	BOK DINAS KABUPATEN	3.968.623.595,00	13.987.338,97	0,35%
3	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	150.000.000,00	728.669,00	0,49%
4	BOK PUSKESMAS	8.481.718.304,00	39.038.185,69	0,46%
27	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	3.239.300.000,00	15.941.449,88	0,49%
28	DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UMK	250.000.000,00	4.475.065,25	1,79%
29	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	133.300.002,00	-	0,00%
30	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	65.827.750,00	-	0,00%
31	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	132.000.000,00	671.327,41	0,51%
32	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	250.000.000,00	2.958.785,56	1,18%
33	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	300.045.000,00	211.330,00	0,07%
34	DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	200.000.000,00	1.022.220,38	0,51%
	DANA CADANGAN	673.930.698,00		
<b>TOTAL NON FISIK</b>		<b>133.764.611.644,00</b>	<b>760.274.757,86</b>	<b>0,57%</b>

Sumber : Data Sekber DAK Ditjen Bina Bangda Per 31 Agustus 2024

Prosentase tertinggi dari realisasi penyerapan DAK Non Fisik terdapat pada Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK, sebesar 1,79% (Rp. 4.475.065.250) dari pagu dana sebesar Rp. 250.000.000.000.

## 2.2 Dukungan dan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dan Daerah

Selama bulan Agustus 2024 Bantek Sekber DAK telah memberikan dukungan kepada Kementerian/Lembaga dan Daerah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Dukungan dan Koordinasi Lintas K/L dan Daerah

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Proses	Output
Dukungan dan Koordinasi K/L				
1	Rapat Pemetaan Isu Strategis Tugas dan Wewenang GWPP	4 Agustus 2024	Menyiapkan materi dan mengikuti pelaksanaan kegiatan	Laporan Hasil Multilateral Meeting DAK Tahun 2024
2	Multilateral meeting Pengalokasian DAK Non Fisik Tahun 2025	Minggu I – II Agustus 2024	Mengikuti pelaksanaan kegiatan Multilateral meeting DAK Non Fisik Tahun 2025	Laporan Hasil Pembahasan Lokasi Prioritas
Dukungan dan Koordinasi Pemerintah Daerah				
1	Sosialisasi Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	5 Agustus 2024	Menyiapkan Materi Narasumber dan mengikuti pelaksanaan kegiatan	Materi dan Laporan pelaksanaan kegiatan
2	Rapat Koordinasi Verifikasi Usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2025 dalam rangka penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat	6 Agustus 2024	Menyiapkan Materi Narasumber dan mengikuti pelaksanaan kegiatan	Materi dan Laporan pelaksanaan kegiatan
3	Kunjungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	12 Agustus 2024	Fasilitasi kunjungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara	Terfasilitasinya Kunjungan
4	Kunjungan Pemerintah Daerah Kota Dumai, Provinsi Riau	14 Agustus 2024	Fasilitasi kunjungan Pemerintah Daerah Kota Dumai, Provinsi Riau	Terfasilitasinya Kunjungan

### 2.2.1 Dukungan dan Koordinasi K/L

#### 1. Rapat Pemetaan Isu Strategis Tugas dan Wewenang GWPP

Dalam forum ini Ditjen Bina Bangda menyampaikan beberapa isu strategis GWPP dalam pengelolaan DAK, sebagai berikut :

- a. Isu strategis dalam proses perencanaan DAK
  - Perbedaan Basis Data yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proses perencanaan kebijakan dan penentuan lokasi prioritas oleh

Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah

- Kurangnya Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyusun Dokumen Pendukung Tahapan Perencanaan
  - Dalam kebijakan DAK Tahun 2025, Proses Verifikasi usulan Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak tercantum dalam Surat Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-14/ML.7/2024. Dalam pelaksanaannya, akhirnya disepakati bahwa proses verifikasi tetap dilaksanakan namun hanya untuk usulan kabupaten/kota dan dilakukan bersamaan dengan proses penilaian.
  - Terdapat 9 Provinsi yang tidak melakukan verifikasi untuk bidang-bidang DAK yang masuk dalam Tahap I. Hal ini mengakibatkan pertanyaan apakah surat Rekomendasi Gubernur untuk usulan kegiatan DAK Kab/Kota yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan
  - Perlu penguatan/peningkatan kualitas verifikasi dan mengupayakan agar hasil verifikasi digunakan secara konsisten dalam menetapkan persetujuan atas usulan kegiatan daerah
- b. Isu strategis dalam penguatan tata kelola
- Terdapat beberapa pengaturan atau amanat pada pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundangan DAK yang belum dilaksanakan secara konsisten baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  - Koordinasi pengelolaan DAK belum berjalan dengan baik akibat tidak dilaksanakannya amanat Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK untuk membentuk tim koordinasi pengelolaan DAK di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - Perencanaan DAK dilakukan di luar mekanisme perencanaan reguler daerah, sehingga untuk mengakomodir kegiatan DAK dalam dokumen

perencanaan dan anggaran daerah harus dilakukan revisi RKPD maupun APBD.

- Masih terjadinya tumpang tindih antara kegiatan yang dibiayai dari DAK dengan kegiatan yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lainnya.
- Dalam proses penyusunan usulan kegiatan masih terdapat kelemahan terutama terkait pemahaman mengenai kriteria atau persyaratan prioritas nasional.
- Usulan kegiatan DAK hanya disusun oleh perangkat teknis daerah dan belum dikordinasikan dengan perangkat daerah terkait lainnya.
- Pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan DAK belum dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi serta belum adanya anggaran untuk menjamin kelancaran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK di daerah.
- Pelaporan triwulan sangat minim data yang didapat dari daerah pertriwulannya karena belum optimalnya laporan capaian atau realisasi keuangan dan fisik sebagaimana yang diharapkan, hal ini antara lain terkendala oleh instrumen pelaporan yang masih bersifat manual

### **2.2.2 Dukungan Kepada Pemerintah Daerah**

#### **1. Sosialisasi DAK melalui Dekon GWPP dan Fasilitasi Kunjungan Daerah**

Selama periode bulan Agustus 2024, Bantek Sekber DAK memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah melalui pemberian informasi pada kegiatan rapat sosialisasi pelaksanaan DAK Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi GWPP, mengenai pelaksanaan DAK yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya dalam proses perencanaan dan pelaporan. Selain itu Bantek Sekber DAK juga melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah secara langsung pada saat kunjungan Pemerintah Daerah. Beberapa hal yang dibahas pada saat kunjungan antara lain mengenai kendala dalam proses perencanaan, koordinasi lapangan serta sistem pelaporan yang selama ini dirasakan oleh Pemerintah Daerah kurang optimal.

## 2. Pelaksanaan Verifikasi

Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sekaligus penerbitan surat rekomendasi Gubernur selaku GWPP untuk usulan kegiatan DAK Kabupaten/Kota di wilayahnya.

### 2.3 Dukungan dan Koordinasi Internal

Selama bulan Agustus 2024, dukungan internal yang diberikan oleh Bantek Sekber DAK adalah mendukung proses Pemutakhiran dan Kodefikasi untuk kegiatan DAK baik Fisik maupun Non Fisik.

*Tabel 10. Realisasi Dukungan dan Koordinasi Internal*

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Proses	Output
1	Dukungan dalam penyusunan Pemutakhiran data dan kodefikasi kegiatan DAK	Minggu I – IV Agustus 2024	Melakukan koordinasi dengan subdit pengampu DAK dan menyusun Pemutakhiran data dan kodefikasi kegiatan DAK	Draft Pemutakhiran data dan kodefikasi kegiatan DAK

## Bab

# RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN BULAN SEPTEMBER 2024

### 4.1 Rencana Kerja Bulan September 2024

Secara umum dan ringkas, rencana kerja bulan September 2024 difokuskan pada pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan SE tentang Penguatan Tata Kelola dan Pemutakhiran kegiatan dan Kodefikasi DAK

Tabel 11. Rencana Kerja Bulan September 2024

No	Rencana Kegiatan dan Uraian Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		September 2024			
		I	II	III	IV
<b>Updating Data Hasil Pelaksanaan DAK</b>					
1	Laporan Hasil Pelaksanaan DAK Tahun 2024 (Triwulan I dan II)				
<b>Dukungan dan Koordinasi Lintas K/L</b>					
1	Pembahasan Draft SE tentang Penguatan Tata Kelola DAK				
<b>Dukungan dan Koordinasi Daerah</b>					
1	Fasilitasi Kunjungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota				
<b>Dukungan dan Koordinasi Internal</b>					
1	Penguatan Tata Kelola DAK				
2	Persiapan iPelaksanaan Pemutakhiran kegiatan				
<b>Dukungan dalam pengelolaan Aplikasi Binwasdak</b>					
1	Updating Data dalam aplikasi Binwasdak				
<b>Pelaporan</b>					
1	Penyusunan Laporan September 2024				

# Bab

## PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan pekerjaan di periode Agustus 2024 adalah sebagai berikut :

1. Draft surat mengenai pelaporan kepada Pemerintah Daerah, sampai saat ini belum dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah, sehingga hingga saat ini kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penyampaian pelaporan masih sangat rendah.
2. Terdapat perbedaan antara kode kegiatan DAK yang digunakan oleh Kementerian dengan yang terdapat dalam SIPD.

### 5.2 Rekomendasi

1. Ditjen Bina Bangda perlu segera menerbitkan surat mengenai penyampaian pelaporan kepada Pemerintah Daerah, sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam pelaporan.
2. Perlu dilakukan konfirmasi ulang dengan K/L teknis mengenai kodefikasi yang digunakan sebelum dilakukan proses pemutakhiran.



## LAMPIRAN 1. DOKUMENTASI KEGIATAN BANTEK SEKBER DAK

### Kunjungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara



### Kunjungan Pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau

